



Perkembangan Kota Bandung pada Masa kolonial Abad ke-19

Yan Nurcahya¹, Deri Sugiarto², M Kautsar Thariq Syah³

Magister Sejarah Peradaban Islam, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia¹⁻³

*Email Korespondensi: yan.itb2021@gmail.com

Diterima: 20-05-2025 | Disetujui: 21-05-2025 | Diterbitkan: 22-05-2025

ABSTRACT

Colonialism is the control of territory, natural resources, and other people by foreign groups. The colonizers control the political and tribal power in the colonized area. With the article presented, since the 19th century has a history of physical form in the development of the city of Bandung. Changes in Bandung began with the inauguration of the city. In other words, the first change occurred in the physical city. It should be stated that in general understanding, the city of Bandung was founded by Governor General H.W. Daendels in 1810. The historical research method is an approach used to investigate, analyze, and reconstruct past events or phenomena based on available sources. Historical research aims to understand past events in context, identify causes and effects, and provide objective interpretations. From the research conducted, it can provide a picture of the city of Bandung which began to be developed during colonialism.

Keywords: Bandung City; Colonialism; 19th Century; History; City Development.

ABSTRAK

Kolonialisme adalah pengendalian wilayah, sumber daya alam, dan orang lain oleh kelompok asing. Penjahat mengendalikan kekuatan politik dan suku di wilayah yang dijajah. Dengan artikel yang disampaikan, sejak abad ke-19 memiliki sejarah berbentuk fisik pada pembangunan Kota Bandung. Perubahan di Bandung berawal dari peresmian berdirinya kota. Dengan kata lain, perubahan pertama kali terjadi pada fisik kota. Perlu dikemukakan, bahwa dalam pemahaman umum, kota Bandung didirikan oleh Gubernur Jenderal H.W. Daendels tahun 1810. Metode penelitian sejarah adalah pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki, menganalisis, dan merekonstruksi peristiwa atau fenomena masa lalu berdasarkan sumber-sumber yang tersedia. Penelitian sejarah bertujuan untuk memahami peristiwa masa lalu dalam konteksnya, mengidentifikasi sebab-akibat, dan memberikan interpretasi yang obyektif. Dari penelitian yang dilakukan, bisa memberi gambaran Kota Bandung yang mulai dikembangkan pada kolonialisme.

Katakunci: Kota Bandung; Kolonialisme; Abad 19; Sejarah; Perkembangan Kota.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Nurcahya, Y., Sugiarto, D., & Syah, M. K. T. (2025). Perkembangan Kota Bandung pada Masa kolonial Abad ke-19. Jurnal Ilmiah Literasi Indonesia, 1(1), 43-54. <https://doi.org/10.63822/j9fp6691>

PENDAHULUAN

Kolonialisme adalah sistem di mana sebuah negara (kolonial) menguasai dan mengendalikan wilayah lain (koloni) untuk kepentingan ekonomi, politik, dan sosialnya. Negara kolonial seringkali memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga kerja dari koloni untuk keuntungan mereka sendiri.

Kolonialisme adalah pengendalian wilayah, sumber daya alam, dan orang lain oleh kelompok asing. Penjajah mengendalikan kekuatan politik dan suku di wilayah yang dijajah. Meskipun sering kali merupakan proyek imperialis, kolonialisme juga dapat mengambil bentuk kolonialisme pemukim, di mana pemukim dari satu atau beberapa kota metropolitan yang menjajah menduduki suatu wilayah dengan tujuan menggantikan sebagian atau seluruh populasi yang ada.

Penggunaan awal istilah kolonialisme merujuk pada perkebunan yang menjadi tempat para lelaki beremigrasi dan menetap. Istilah ini meluas maknanya pada awal abad ke-20 dan terutama merujuk pada ekspansi kekaisaran Eropa dan penaklukan kekaisaran terhadap bangsa Asia dan Afrika. Kota Bandung memiliki banyak peninggalan kolonial, terutama di kawasan Braga dan sekitarnya. Beberapa bangunan bersejarah yang masih berdiri kokoh di antaranya adalah Gedung Merdeka, De Majestic, De Vries, Hotel Savoy Homann, Apotek Kimia Farma, Sarinah Braga, dan Bank BJB. Selain itu, terdapat juga kawasan lain seperti Babakan Ciamis, Citarum, dan Merdeka yang memiliki banyak bangunan kolonial.

Bandung secara resmi didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada 25 September 1810. Daendels sendiri sebenarnya adalah gubernur jenderal yang mewakili Perancis, karena saat itu Belanda berada di bawah kekuasaan Perancis. Saat itu, Perancis sedang berperang dengan Inggris, dan Jawa adalah wilayah yang sedang akan direbut Inggris. Maka untuk mempertahankan Jawa, Daendels membuat jalan yang berfungsi sebagai jalur pertahanan memanjang dari Anyer di ujung barat Jawa sampai Panarukan di ujung timur Jawa, yang disebut juga sebagai Jalan Raya Pos. Jalan itu sedianya menyusur pesisir utara Jawa, namun karena alasan strategi suplai logistik, dari Karawang jalan itu dibelokkan ke arah selatan untuk mencapai wilayah yang kemudian menjadi cikal bakal Kota Bandung. Daendels juga memerintahkan pusat pemerintahan tradisional Bandung yang awalnya berada di daerah Dayeuhkolot dipindahkan ke dekat Jalan Raya Pos, atau yang sekarang dikenal sebagai Alun-Alun Bandung. Di lokasi itu didirikan pendopo sebagai tempat bupati Bandung memerintah, dan masjid yang kemudian disebut Masjid Agung.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam sejarah merupakan serangkaian pedoman atau prinsip sistematik yang digunakan untuk menghimpun sumber-sumber sejarah dengan efisien serta melakukan penilaian kritis untuk menyusun narasi sejarah. Sesuai dengan pendapat Nugroho Notosusanto, proses penelitian sejarah melibatkan tahapan-tahapan berikut: heuristik, verifikasi, interpretasi, dan penulisan.

Metode penelitian sejarah adalah pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki, menganalisis, dan merekonstruksi peristiwa atau fenomena masa lalu berdasarkan sumber-sumber yang tersedia. Penelitian sejarah bertujuan untuk memahami peristiwa masa lalu dalam konteksnya, mengidentifikasi sebab-akibat, dan memberikan interpretasi yang obyektif.

Heuristik adalah fase pertama dalam proses penelitian metode sejarah. Peneliti melakukan pengumpulan sumber-sumber sejarah. Sumber-sumber ini dapat berupa artefak sejarah yang mencerminkan

masa lalu yang ditemukan melalui studi literatur yang berlandaskan pada laporan lisan, serta melalui observasi lapangan, termasuk data primer dan sekunder.

Kedua, verifikasi. Yakni disebut kritik sumber, adalah proses penelitian yang digunakan untuk menilai keabsahan dan keandalan sumber-sumber sejarah dengan melakukan evaluasi baik dari segi eksternal maupun internal. Pada verifikasi, penelitian diperlukan dalam menunjang sumber yang menjadi bahan evaluasi dalam penelitian ini.

Ketiga, Interpretasi. Tahapan interpretasi terdiri dari dua komponen yakni analisis dan sintesis. Melalui proses interpretasi, peneliti melakukan penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah masjid di Bandung yang telah disaring melalui proses verifikasi serta mensinkronkan. Hasil dari interpretasi ini akan membentuk dasar pembuatan karya tulis sejarah.

Keempat, Historiografi (penulisan). Historiografi merupakan kompilasi hasil penelitian yang disusun secara berurutan dalam satu narasi. Ini menjadikan penggabungan elemen-elemen fakta menjadi sebuah narasi sejarah yang disampaikan dalam bentuk tulisan. Proses ini terjadi setelah proses pencarian, evaluasi, dan interpretasi sumber-sumber sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuatnya pengaruh kekuasaan/otoritas bupati terhadap rakyat, merupakan faktor dasar penyebab kegagalan pemerintah kolonial melaksanakan sistem pemerintahan langsung (*direct rule*). Perubahan fungsi kota Bandung menjadi ibukota keresidenan (sejak pertengahan tahun 1864) adalah kehendak residen Priangan, atas persetujuan gubernur jenderal Hindia Belanda, dan kota Bandung menjadi pusat transportasi kereta api.

Perubahan Sosial

Perubahan sosial di Bandung pada periode tersebut, perlu dikaji secara komprehensif melalui aspek-aspek yang berubah. Dengan demikian akan diperoleh pemahaman yang komprehensif pula, karena tidak ada perubahan sosial yang berdiri sendiri. Perubahan dalam satu aspek biasanya diikuti oleh atau sejalan dengan perubahan-perubahan aspek lain yang berhubungan. Perubahan sosial dapat dikatakan dikehendaki atau diharapkan (*intended change*) apabila bersumber pada perilaku individu-individu berdasarkan kehendak atau tujuan tertentu (Etzioni and Eva Etzioni, eds., 1964 : 358). Di Bandung hal itu memang terjadi. Berdirinya kota Bandung adalah kehendak Bupati R.A. Wiranatakusumah II (1794 – 1829) dan diharapkan oleh Gubernur Jenderal H.W. Daendels (1808 – 1811). Perubahan fungsi kota Bandung menjadi ibukota keresidenan (sejak pertengahan tahun 1864) adalah kehendak residen Priangan, atas persetujuan gubernur jenderal Hindia Belanda, dan kota Bandung menjadi pusat transportasi kereta api “Jalur Barat” (sejak pertengahan tahun 1884) adalah keputusan gubernur jenderal. Demikian pula pembentukan Gemeente Bandung adalah kehendak gubernur jenderal yang sesuai dengan aspirasi masyarakat Eropa di kota itu.

Sifat dan efektivitas pengaruh kekuasaan pejabat-pejabat tersebut, berhubungan pula dengan fungsi kota, khususnya fungsi administratif. Fungsi kota dalam bidang sosial ekonomi pun pada dasarnya terjadi akibat pengaruh kekuasaan dan perkembangan fungsi administratif kota. Fungsi kota dimaksud adalah pertama, sebagai ibukota kabupaten (1810 – 1864), kedua, sebagai ibukota keresidenan merangkap fungsi

pertama (1864 – 1884), ketiga, sebagai pusat transportasi kereta api “Jalur Barat”, merangkap fungsi pertama dan kedua (1884 - 1906). Efektivitas pengaruh kekuasaan yang dilandasi oleh fungsi kota, khususnya fungsi administratif, menyebabkan perubahan fisik kota dan sosial ekonomi. Perubahan kedua aspek yang disebut terakhir berpengaruh secara timbal-balik. Perubahan fisik kota dan sosial ekonomi pada gilirannya berpengaruh pula terhadap kekuasaan, sehingga timbul kebijakan mengenai perubahan selanjutnya. Hal tersebut mengandung arti, bahwa proses perubahan fisik kota dan sosial ekonomi berlangsung lambat atau cepat, banyak tergantung pada sifat dan efektivitas pengaruh kekuasaan serta fungsi kota dan perkembangannya. Berdasarkan pemikiran tersebut, perubahan pada periode 1864 – 1884 akan lebih cepat dari perubahan pada periode 1810 – 1864, dan perubahan pada periode 1884 – 1906 akan lebih cepat dari perubahan pada periode 1864 – 1884. Percepatan perubahan pada periode 1884 – 1906 terjadi – selain disebabkan oleh faktor-faktor yang telah ada pada periode sebelumnya – akibat munculnya dua faktor pendorong percepatan perubahan. Pertama, transportasi kereta api (faktor teknologi). Kedua, potensi sumber daya manusia, yaitu pihak swasta asing (pengusaha besar dan lembaga sosial). Di antara kedua faktor itu, transportasi kereta api yang syarat dengan unsur teknologi merupakan faktor penting pendorong percepatan perubahan (Smelser, 1981 : 457, 463).

Berdasarkan uraian tersebut, maka hubungan aspek kekuasaan dengan aspek fisik kota dan sosial ekonomi, serta interaksi antara kedua aspek yang disebut terakhir, merupakan pola dasar perubahan, khususnya pada periode 1810 – 1864 dan periode 1864 – 1884. Pada periode 1884 – 1906 pola perubahan berubah karena keberadaan faktor penting pendorong perubahan. Telah disebutkan bahwa perubahan berasal dari kekuasaan bupati dan kekuasaan gubernur jenderal/residen. Secara politis, dalam struktur pemerintahan kolonial, bupati adalah objek kekuasaan gubernur jenderal/residen (subjek kekuasaan). Namun demikian, bupati tetap memiliki kekuasaan/otoritas, paling tidak dalam kedudukan sebagai pemimpin tradisional, karena kepemimpinan tradisional bupati berakar pada struktur sosial berdasarkan unsur kelahiran, kekayaan, dan status sosial (Kartodirdjo, 1982 : 226). Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana proses perubahan berlangsung, maka hubungan kekuasaan gubernur jenderal/residen dengan kekuasaan bupati, serta kedudukan (posisi) dan peranan bupati dalam proses perubahan, perlu dijelaskan. Masalahnya, kekuasaan adalah refleksi dari kedudukan dan peranan merupakan manifestasi dari kedudukan dan kekuasaan. Untuk men-jelaskan hal tersebut, digunakan pendekatan-an sosiologi-politik.

Kuatnya pengaruh kekuasaan/otoritas bupati terhadap rakyat, merupakan faktor dasar penyebab kegagalan pemerintah kolonial melaksanakan sistem pemerintahan langsung (direct rule). Akibat kegagalan itu, pengaruh kekuasaan pemerintah kolonial (khususnya gubernur jenderal/residen) hanya sampai pada bupati, sehingga bupati berperan sebagai perantara (middleman) yang menghubungkan kepentingan pemerintah kolonial terhadap rakyat. Namun demikian, bupati tetap merupakan objek kekuasaan pemerintah kolonial, yang berarti hubungan kedua belah pihak bersifat tidak seimbang, karena kedudukan masing-masing dalam struktur pemerintahan memang berbeda. Akibat pemerintah kolonial gagal menjalankan sistem pemerintahan langsung, maka dalam hubungan kepentingan antara pemerintah kolonial dengan bupati dan rakyat, terjadi ketergantungan antara satu pihak pada pihak lain. Berhasil-tidaknya kehendak atau tujuan pemerintah kolonial, sangat tergantung pada bupati. Sebaliknya, nasib bupati banyak tergantung pada kebijakan pemerintah kolonial. Pada sisi lain, berhasil-tidaknya bupati merealisasikan kebijakan/kehendak pemerintah kolonial, tergantung pada rakyat. Sementara itu, kehidupan rakyat banyak tergantung pada kebijaksanaan/kepemimpinan bupati.

Berdasarkan pemikiran teoretis dan pendekatan yang digunakan, pada dasarnya perubahan sosial di Bandung berasal dari aspek kekuasaan yang berasal dari dua sumber. Pertama, kekuasaan pemerintah tradisional (kabupaten) yang otoritasnya dipegang oleh bupati. Kedua, kekuasaan pemerintah kolonial yang otoritasnya dipegang oleh gubernur jenderal dan/atau residen. Akan tetapi, sifat dan efektivitas pengaruh kekuasaan masing-masing pejabat terhadap aspek-aspek yang berubah, juga tidak sama. Ketika kota Bandung hanya berfungsi sebagai ibukota kabupaten (1810 – 1864), perubahan berasal dari dominasi kekuasaan bupati langsung dan tidak langsung ditunjang oleh pengaruh kekuasaan gubernur jenderal/residen. Akan tetapi, perubahan berjalan lambat. Hal itu disebabkan oleh keberadaan faktor-faktor penghambat dan sifat pengaruh kekuasaan terhadap perubahan. Faktor utama penghambat perubahan adalah kondisi kota dan lingkungannya belum menunjang. Akibatnya pengaruh kekuasaan bupati terhadap perubahan menjadi kurang efektif. Sementara itu, gubernur jenderal/residen – meskipun sebagai subjek kekuasaan – pengaruh kekuasaannya di Bandung waktu itu relatif lemah, karena kedua pejabat itu berada di tempat yang jauh dari objek kekuasaan dan belum ditunjang oleh sarana komunikasi. Kedua pejabat itu masing-masing berkedudukan di Jakarta (Batavia) dan di Cianjur (ibukota Keresidenan Priangan).

Perubahan di Bandung berawal dari peresmian berdirinya kota. Dengan kata lain, perubahan pertama kali terjadi pada fisik kota. Perlu dikemukakan, bahwa dalam pemahaman umum, kota Bandung didirikan oleh Gubernur Jenderal H.W. Daendels tahun 1810. Hasil penelitian penulis sampai pada simpulan, bahwa kota Bandung didirikan oleh dan atas kehendak (kebijakan) Bupati Bandung ke-6, R.A. Wiranatakusumah II (1794 – 1829). Akan tetapi proses pendiriannya dipercepat oleh perintah Daendels. Demikian pula peresmian kota itu dilakukan oleh Daendels dengan surat keputusan (besluit) tanggal 25 September 1810. Hal itu berarti tanggal tersebut dapat dianggap sebagai “Hari Jadi Kota Bandung”.

Perubahan Infrastruktur

Sebelum berada di posisi yang sekarang, letak ibu kota Kabupaten Bandung di Krapyak (sekarang Dayeuh Kolot), di tepi Sungai Citarum, di muara Sungai Cikapundung. Bupati Wiranatakusumah II (1794–1829) menggeser ibu kota kabupaten ke arah utara, ke wilayah Tatar Ukur. Alasan perpindahan adalah letak ibu kota yang lama (di Krapyak) tidak strategis, di daerah itu masih terdapat hutan, payau, dan danau kecil, serta untuk menghindari banjir pada musim hujan karena daerah Krapyak berada di dataran rendah. Kondisi itu menyulitkan tugas para pejabat di pusat yang bertugas di wilayah itu. Ditambah lagi daerah itu menjadi sarang penyakit (Dana 1990, 13; Hardjasaputra 2002, 26).

Pada masa awal Kota Bandung berdiri sampai 1811, sulit untuk mengetahui jumlah penduduknya karena belum ada sumber mengenai hal itu. Diduga penduduk Bandung bertambah dengan masuknya orang Tionghoa yang kemungkinan berasal dari Buitenzorg (Bogor) dan Batavia. Kedatangan orang Tionghoa berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk berdagang. Hal itu didukung oleh Daendels yang mengizinkan orang Tionghoa tinggal di kabupaten dengan melakukan kegiatan ekonomi, memajukan perekonomian (Hardjasaputra 2002, 74). Data mengenai penduduk Kota Bandung baru diketahui pada 1812. Jumlah penduduk Kota Bandung ketika itu berjumlah 1800 jiwa yang terdiri atas orang pribumi (mayoritas orang Sunda dan sejumlah kecil orang Jawa), orang Eropa (8 jiwa), dan beberapa penduduk dari golongan Timur Asing, kebanyakan orang Tionghoa. Pertumbuhan penduduk dari kalangan Tionghoa di wilayah Priangan relatif lambat karena ada kebijakan *passenstelsel* dari Gubernur Jenderal Van der Capellen pada 9 Januari 1821. Isi peraturan itu adalah menutup daerah Priangan bagi para

pendatang asing, baik orang Eropa maupun orang Timur Asing. Jika hendak bepergian, mereka harus memiliki pas jalan yang disahkan oleh penguasa daerah setempat (Hardjasaputra 2002, 75–76).

Pada tahun 1830-an penduduk Kota Bandung semakin heterogen dengan masuknya orang Melayu pada 1833 dan orang Arab pada 1836. Dalam catatan kependudukan, orang Arab dimasukkan ke dalam golongan orang Melayu (Wertheim 1958, 229). Hingga tahun 1840-an jumlah penduduk asing kecil, sedangkan jumlah penduduk pribumi bertambah. Hal ini karena *Passenstelsel* masih diterapkan. Jumlah penduduk pribumi meningkat karena migrasi yang disebabkan berbagai kegiatan di Kota Bandung. Mereka bekerja sebagai buruh/kuli dan berdagang. Mereka berasal dari Priangan Timur dan Selatan. Kepindahan mereka atas anjuran residen karena paceklik akibat gagal panen di wilayah asal mereka. Ketika *Passenstelsel* dicabut pada 1852, Residen Priangan mengizinkan orang Eropa pendatang tinggal di ibu kota kabupaten dengan syarat mereka harus memberikan banyak keuntungan. Kebijakan ini ditengarai sebagai yang menyebabkan jumlah penduduk Eropa dan Tionghoa meningkat (Dana 1990, 14; Hardjasaputra 2002, 86).

Residen Priangan C.P.C. Steinmetz hingga pertengahan abad ke-19 masih berkedudukan di Cianjur dan tinggal di kantor keresidenan karena belum memiliki rumah dinas. Oleh karena itu, pemerintah pusat memiliki rencana membangun rumah dinas untuk residen. Berkaitan dengan hal itu, Steinmetz mengusulkan, daripada dibuatkan rumah di Cianjur, lebih baik ia memindahkan pusat keresidenan ke Bandung. Pertimbangannya adalah suhu udara di Bandung lebih nyaman dibandingkan di Cianjur, letak Kota Bandung yang strategis di bagian tengah Priangan, jumlah penduduk Bandung lebih besar daripada penduduk Cianjur, Bandung lebih kaya akan tanaman kopi dan padi, kehidupan perekonomian di Bandung lebih berkembang dan memiliki prospek lebih baik (Hardjasaputra 2002, 124–25).

Gagasan residen tersebut didiskusikan oleh gubernur-jenderal, dewan Hindia-Belanda, dan para kepala departemen, seperti Departemen Keuangan, Departemen Transportasi dan Komunikasi, Departemen Militer, dan Dinas Pekerjaan Umum). Semula, dengan alasan biaya yang besar untuk membangun infrastruktur, dewan Hindia-Belanda dan para kepala departemen tidak setuju dengan gagasan itu. Dewan Hindia-Belanda menyarankan untuk membagi wilayah Keresidenan menjadi dua, yaitu Priangan Barat dan Timur. Priangan Barat meliputi Kabupaten Cianjur, Sukabumi, dan Bandung dengan ibu kota kabupaten di Cianjur. Sementara itu, Priangan Timur meliputi Kabupaten Sumedang, Limbangan, Sukapura dengan ibu kota kabupaten di Singaparna atau Tasikmalaya (ANRI, *Algemeen Verslag Preanger* 1856, bundel 4/5; Hardjasaputra 2002, 125).

Persetujuan pemindahan ibu kota Keresidenan Priangan terjadi pada masa pemerintahan GubernurJenderal Charles Ferdinand Pahud (1808-1873) dalam verbaal 28 Juni 1856 diikuti dengan surat usulan tanggal 11 Oktober 1856 No. 84. Verbaal dan surat usulan ditujukan kepada menteri urusan koloni. Proses persetujuan berjalan berlarut-larut. Pemindahan ibu kota Keresidenan Priangan terjadi pada masa Residen J.W.J.C.van der Moore pada 1864. Itu pun karena dorongan bencana alam, meletusnya Gunung Gede pada pertengahan 1864 yang mengakibatkan kerusakan bangunan-bangunan di Cianjur dan Bogor. Pada 21 Mei 1864 residen menulis surat kepada Gubernur-Jenderal supaya rencana pemindahan ibu kota Keresidenan Priangan segera diputuskan. Usulan itu belum dibalas oleh menteri urusan koloni sehingga GubernurJenderal menyetujui usulan itu (Hardjasaputra 2002, 126–27).

Berdasarkan *Staatsblad* 7 Agustus 1864 No. 18, Gubernur Jenderal L.A.J.W. Sloet van de Beele (1806-1890) menetapkan Kota Bandung sebagai pusat pemerintahan Karesidenan Priangan menggantikan

Cianjur. Keputusan itu disetujui oleh Menteri urusan tanah jajahan berdasarkan surat tanggal 7 November 1864. Kepindahan residen Priangan ke Kota Bandung juga mengalihkan kekuasaan terhadap Kota Bandung dari bupati kepada residen. Residen melakukan pengawasan terhadap bupati secara langsung (Encyclopaedie Nederlandsch Indië 1917, 138; Hardjasputra 2002, 127–128).



Gambar 1. Atlas sekolah Hindia-Nederland peta Preanger Tahun 1909 (Sumber: W. Van Gelder)

Kota Bandung mengalami perubahan penting setelah menjadi ibu kota Keresidenan Priangan. Pembangunan berbagai sarana dilakukan, antara lain pembangunan kantor keresidenan. Pembangunan kantor itu di atas lahan di daerah Kampung Bogor (daerah Cicendo selatan). Perancang bangunan adalah seorang insinyur yang menjadi staf residen dan pelaksananya adalah Bupati Bandung R.A. Wiranatakusumah IV. Para pekerja berasal dari penduduk Kampung Bogor dan Balubur Hilir. Gedung keresidenan yang bergaya Indisch-Empire Style merupakan bangunan modern pertama di Kota Bandung dan selesai pada 1867 (Mooi Bandoeng 1933, 134).

Sementara itu, Kota Bandung pada periode tersebut mengalami perkembangan. Di Jalan Raya Pos terdapat tiga toko milik orang Belanda dan Tionghoa, yaitu toko milik Loheyde, toko/hotel milik Thiem, dan toko roti milik Oey Bouw Hoen. Sementara itu, di Jalan Braga sudah berdiri enam rumah terbuat dari batu milik pejabat dan pensiunan Belanda. Ada juga beberapa warung dari bambu dan beberapa toko. Sampai 1881 jumlah rumah di Jalan Braga bertambah menjadi delapan buah (Buys 1891, 119; 121). Pada periode tersebut hubungan di antara penduduk Kota Bandung tidak terbatas pada penduduk Belanda dengan pribumi. Penduduk Tionghoa, yang sejak periode terdahulu telah ada di Kota Bandung melalui kegiatan perdagangan, kerap berhubungan dengan penduduk lainnya. Berbagai kuliner khas Tionghoa, seperti bacang, bakmi, bakpau, kecap, sekoteng, tauco dikenal juga oleh penduduk pribumi. Sebaliknya, penduduk Tionghoa juga mengenal dan menyerap sebagian budaya Sunda, seperti bahasa dalam kehidupan keseharian mereka (Kunto 1986, 508).

Dalam perkembangan dan dinamika Kota Bandung, inisiatif yang muncul tidak hanya dari kalangan komunitas Eropa. Inisiatif komunitas pribumi, dalam hal ini Bupati R.A.A. Martanegara, patut diperhitungkan. Salah satu gagasannya adalah mengganti atap alang-alang di rumah penduduk pribumi dengan atap genting. Pada 1893, sekitar 75% dari jumlah rumah penduduk Bandung, termasuk 50 rumah orang Eropa dari golongan rendah masih beratap alang-alang. Oleh karena genting sulit didapat, bupati mendatangkan ahli pembuat genting dari luar Bandung untuk melatih penduduk membuat genting. Mereka yang diperintahkan belajar membuat genting adalah penduduk Kampung Merdika. Di kampung itu dibangun lio (tempat pembakaran genting) sehingga nama kampung itu kemudian menjadi Merdikalio (Hardjasaputra 2002, 242).



Gambar 2. Grand Hotel Homan (1939) hotel bintang empat bergaya art deco yang berada di Jl. Asia-Afrika (dahulu Jalan Raya Pos) No. 112 (Sumber: Chainwit)

Inisiatif lain Bupati R.A.A. Martanegara adalah memanfaatkan lahan tidur di pinggir kota. Lahan yang masih berupa payau (ranca) ditimbun dengan tanah dan dijadikan lahan persawahan dan permukiman. Bupati R.A.A. Martanegara juga memiliki gagasan mengganti beberapa jembatan kayu di Bandung dengan jembatan besi berpenyangga beton. Salah satunya adalah jembatan gantung yang melintasi Sungai Cikapundung, dekat Balonggedeweg (Kunto 1984, 157–158). Selain perumahan dan infrastruktur, berkaitan dengan hasil pertanian, Bupati R.A.A. Martanegara melihat potensi ketela pohon sebagai bahan baku tepung tapioka. Bupati melihat tepung tapioka memiliki pasar yang menjanjikan, terutama di beberapa negara Eropa, salah satunya adalah Belanda. Maka, Bupati meminta para petani untuk menanam ketela pohon (Hardjasaputra 2002, 252).

Sejak pertengahan tahun 1890-an, berbagai sarana dan fasilitas di Bandung yang dibangun oleh perusahaan swasta bertambah. Salah seorang pengusaha, M. Klass de Vries datang beserta keluarganya dan

menetap di Bandung. Pada awalnya, mereka membuka sebuah toko kecil di pinggir Jalan Raya Pos, di sebelah utara alun-alun. Lalu, mereka membuka toko besar di seberang sositet Concordia. Toko itu terkenal di kalangan para pengusaha perkebunan (Kunto 1986, 327). De Vries juga mendirikan percetakan J.R. de Vries & Co. Percetakan lainnya adalah Javasche Boekhandel en Drukkerij dan H.M. van Dorp & Co yang terletak di Jalan Braga (Kunto, 1986: 190). Peningkatan jumlah orang Eropa di Bandung mendorong pemerintah untuk membangun sarana rekreasi. Salah satunya, atas inisiatif Asisten Residen Bandung Pieter Frederik Sijthoff (1931), pada 1885 dibangun taman kota pertama yang diberi nama Pieter Park, sekarang Taman Dewi Sartika di halaman balai kota Bandung (Kunto 1985, 116–17; Hardjasaputra 2006, 9).



Gambar 3. Masjid Raya Bandung (1929) dibangun sejak tahun 1810 (Sumber: Collectie Tropenmuseum De Moskee Aan De Alun-Alun In Bandoeng)

Pada 1895 di ujung selatan jalan Braga berdiri gedung Societeit Concordia (sekarang bangunan yang terletak di sayap kiri Gedung Merdeka). Gedung itu semula dibangun untuk tempat pertemuan Bandoengsche Landbouwwereeniging (Perhimpunan Pengusaha Perkebunan Bandung). Bangunan itu kemudian direnovasi untuk kegiatan perkumpulan Societeit Concordia dan tempat hiburan (musik dan dansa) bagi orang Eropa (Belanda). Berdasarkan Ordonantie Staatsblad 29 Juni 1879 No. 208, selain orang Eropa, orang Tionghoa juga dapat menjadi anggota perkumpulan itu dengan membayar iuran sebesar 5 gulden per bulan (Bataviaasch Handelsblad, 2/7/1879; De Locomotief, 5/7/1879).

Dalam buku *Wajah Bandoeng Tempo Dulu* (1984) karangan Haryoto Kunto, gagasan awal pembangunan Stasiun Bandung berkaitan dengan pembukaan perkebunan di Bandung sekitar tahun 1870. Pembangunan dimulai sekitar tahun 1883. Pada Agustus 1883, telah dimulai penggalian, pekerjaan bangunan, dan pembuatan jalan akses ke bangunan stasiun. Stasiun ini kemudian diresmikan pada 17 Mei 1884 oleh Staatsspoorwegen (SS) pada masa pemerintahan Bupati Koesoemadilaga; pada waktu yang sama juga dibuka jalur kereta Batavia–Bandung melalui Bogor dan Cianjur.



Gambar 4. Stasiun Bandung didirikan 1887 (Sumber: Station - Bandoeng, KITLV 1400238.tiff)

Pada saat itu, para tuan tanah perkebunan (Preangerplanters) menggunakan jalur kereta api untuk mengirimkan hasil perkebunannya ke Batavia dengan lebih cepat. Untuk menampung dan menyimpan hasil perkebunan yang akan diangkut dengan kereta, maka dibangunlah gudang-gudang penimbunan barang di beberapa tempat di dekat Stasiun Bandung, yaitu Jalan Cibangkong, Jalan Cikudapateuh, daerah Kosambi, Kiaracondong, Braga, Pasirkaliki, Ciroyom, dan Andir. Setelah peresmian jalur Bandung–Surabaya pada 1 November 1894, para pemilik pabrik dan perkebunan gula dari Jawa Tengah dan Timur (Suikerplanters) menyewa kereta api menuju Bandung untuk mengikuti Kongres Pengusaha Perkebunan Gula yang pertama. Kongres tersebut merupakan hasil pertemuan Pengurus Besar Perkumpulan Pengusaha Perkebunan Gula (Bestuur van de Vereniging van Suikerplanters) di Surabaya pada tahun 1896.

KESIMPULAN

Pada awal abad ke-19, Bandung hanyalah sebuah desa kecil. Namun, sejak Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels memerintahkan pembangunan Jalan Raya Pos (De Grote Postweg) pada tahun 1810, Bandung mulai berkembang pesat karena lokasinya yang strategis di jalur tersebut. pusat pemerintahan Kabupaten Bandung dipindahkan dari Dayeuhkolot ke wilayah yang sekarang menjadi pusat Kota Bandung. Ini menjadi titik awal urbanisasi dan perencanaan tata kota kolonial di Bandung. Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan jalur kereta api (tahun 1884) semakin mempercepat pertumbuhan kota dan memudahkan pergerakan manusia serta barang. Jalur kereta api juga mendukung eksploitasi hasil bumi dari Priangan ke Batavia.

Bandung mulai dirancang dengan gaya arsitektur dan tata kota Eropa. Kawasan permukiman

dibedakan secara rasial, yaitu kawasan Eropa, pribumi, dan Tionghoa. Hal ini menunjukkan segregasi sosial khas kota kolonial. Pembangunan infrastruktur, perencanaan tata ruang ala Eropa, serta pertumbuhan ekonomi perkebunan dan perdagangan menjadikan Bandung sebagai salah satu kota penting di Hindia Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

- Go, Julian. (2007). "Kolonialisme (Neokolonialisme)". Ritzer, George (ed.). doi:10.1002/9781405165518 "Regentschap Bandong". Algemeen Verslag over het Jaar 1824 Residentie Preanger Regentschappen. Den Haag : ARA.
- Algemeen Verslag Omtrent de Preanger Regentschappen Over 1824. Arsip Priangan, No. 24A. Bundel 4/5. Jakarta : ANRI.
- Algemeen Verslag Preanger 1856. Arsip Priangan. Bundel 4/5. Jakarta : ANRI. Besluit 7 Augustus 1864. No. 18.
- Bastaman, A. 2018. Bandung City Branding: Exploring the Role of Local Community Involvement to Gain City Competitive Value. *Journal of Entrepreneurship, Business and Economics*. 6, no. 1: 144–165.
- Bataviaasch Handelsblad, 2-7-1879.
- Bataviaasch Nieuwsblad, 16-4-1898; 11-11-1898; 8-3- 1899; 11-7-1925; 8-8-1925; 30-12-1925; 18-12-1935; 8-2-1941; 7-5-1941; 24-5-1941; 3-6-1941.
- Dana, D.W. (1990). Ciri Perancangan Kota Bandung. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ekadjati, Edi S. et al. (1986). Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat (Sampai dengantahun 1950). Bandung : Depdikbud. Proyek IDKD.
- Etzioni, Amitai. (1964). Social Change; Sources, Patterns, and Consequences. New York : Basic Books.
- Hardjasaputra, A. Sobana. (2003). Perubahan Sosial Di Bandung 1810 – 1906. *Jurnal Sosio humaniora*, V col. 5, No. 1, Maret 2003 : 17 - 31
- Hardjasaputra, A.S. (2002). Perubahan Sosial di Bandung 1810-1906. Disertasi Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Indartoyo, I. (2008). Penampilan bangunan art deco yang dibangun di Indonesia tahun 1920-1940 dan bangunan art deco tahun 1985-2005. Prosiding Seminar Nasional Perkembangan Teknologi vs Konservasi Arsitektur.
- Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie. 1883-08-22.
- Johana, T. (2004). Arsitektur art deco. *Arsitekturindis*. <http://www.arsitekturindis.com/?p=87>.
- Kolonien 1850-1900 (Berbagai nomor). Den Haag : ARA.
- Kunto, H. (1984). Wajah Bandoeng tempoe doeloe. Bandung: Granesia.
- Kuntowijoyo, K. (2001). Pengantar ilmu sejarah. Bentang.
- Mailrapporten. (1871), No. 191 & 326. Den Haag : ARA.
- Nurchaya, Yan. (2023). Pelatihan Pengembangan Kemampuan Menulis (Writing Ability) Terhadap Mahasiswa Arsitektur Sebagai Pembekalan Kemampuan Profesional Dan Wirausaha Melalui Menulis. <https://ejournal.upi.edu/index.php/Lentera/article/view/60814>
- Nurchaya, Yan. (2024). Ide-ide Pokok Dalam Filsafat Sejarah – Misnal Munir : Ringkasan. <https://data.mendeley.com/datasets/dk9828kmdv/1>



- Nurcahya, Yan. (2025). Konsep Modifikasi untuk Rumah Berkelanjutan Di Permukiman Informal Perkotaan: Systematic Literature Review.
- Nurcahya, Yan. (2021). Tipologi Rumah Tinggal : Dari Arsitektur Tradisional ke Hunian Vertikal. Bandung: UPI Press.
- Residentie Preanger Regentschappen. Statistieke Staat van Bovengemeld Regentschap Over 1835. Collectie J. van den Bosch. No. 552. Den Haag : ARA.
- Sultan, Nazmul. (2024). "Apa Itu Kolonialisme? Klaim Ganda dari Kategori Politik Abad ke-20" . American Political Science Review . 119 : 435– 448. doi : 10.1017/S0003055424000388
- Tignor, Roger. (2005). Kata Pengantar Kolonialisme: Tinjauan Teoritis . Markus Weiner Publishers.
- Wertheim, W.F. 1958. The Indonesia Town: Study in Urban Sociology. The Hague: W. van Hoeve.
- Yamani, Zaki. (2018). Bandung, Kota dengan Wajah Kolonialisme. <https://www.dw.com/id/bandung-si-kota-kembang-dengan-wajah-kolonialisme/a-44565819>
- Yencken, D. 2013. Creative Cities. Space, Place & Culture 3: 1–21.